

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang Penelitian

Kinerja merupakan suatu kegiatan ternilai dari suatu organisasi dalam periode berjalan sebagai tolok ukur keberhasilan aktivitasnya (Azhar, 2008). Kinerja keuangan pemda ialah suatu pengukuran dalam menilai kemampuan pemda menerapkan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda telah memberikan suatu tugas yang berkepentingan didalam mengelola pengaturan di dalam daerah provinsi maka daerah dituntut untuk melakukannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah pusat.

Dengan adanya pemberian daerah otonomyang mengedepankan kemandirian di suatu daerah. Maka akan tercipta keselarasan dalam pendayagunaan pembiayaan finansial. Oleh karenanya dibutuhkan pelaporan pembiayaan yang terlengkap. Sehingga dapat menggambarkan sumber-sumber daya keuangan di suatu daerah tersebut.

Dengan adanya otonomi daerah yang berlaku maka kinerja keuangan dituntut lebih baik dari era otonomi daerah. Berkaitan adanya hal tersebut pemerintah seharusnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan diadakannya evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintahan yang baik tercipta dari ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan salah satu cara mewujudkan dalam penilaian pemerintahan daerah Haendro Sumarjo (2010).

Perhitungan APBD salah satu bentuk unsure pertanggungjawaban kepala daerah dalam membentuk ukuran suatu kinerja yang berupa rasio-rasio keuangan.

Dalam rangka desentralisasi fiskal dibutuhkan pendelegasian kewenangan dibutuhkan penyerahan tanggungjawab, dilakukan beberapa cara seperti memanfaatkan potensi keuangan disuatu daerah dengan menggunakan sumber-sumber keuangan daerah seperti halnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Abdullah dan Febriansyah (2015).

Dengan adanya misi tersebut maka diperlukan suatu laporan keuangan yang handal sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dan untuk menggambarkan sumber daya keuangan beserta analisis manajemen keuangan daerah bersangkutan. Analisis disini ialah kinerja keuangan pemda yang mengutamakan kemandirian dan mampu mengelola sumber kekayaan daerahnya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan daerah tanggungjawabnya. *Value for money* merupakan pusat dari penilaian kinerja pemda. *Value for money* merupakan dasar penilaian kinerja yang dinyatakan dengan menilai ekonomisnya, keefisienannya, dan keefektifan. Mahmudi (2007) menjelaskan bahwa kinerja keuangan menilainya dengan cara melihat rasio keuangannya yang di dapat dari informasi laporan keuangan yang disusun suatu organisasi tersebut. Rasio tersebut dijadikan sebagai penyampai informasi kinerja keuangan pemda.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomidaerah makakerja keuangan pemda diharapkan dapat mendanai kegiatan daerah dengan cara menggali kekayaan asli daerah. Yuwono *et al.* (2005) mengatakan bahwa pendapatan daerah ialah seluruh kas masuk yang merupakan hak daerah yang mampu

menambah nilai ekuitas pemda dalam periode tersebut dan pemda tidak membayarnya kembali. Pemerintah daerah diharapkan lebih berupaya semaksimal mungkin dalam mendapatkan sumber-sumber keuangan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemerintahannya dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keahlian suatu daerah untuk mendapatkan PAD akan memberikan kesejahteraan dan pembangunan daerah tersebut. Apabila PAD berkontribusi dalam jumlah besar pada APBD, maka tingkat ketergantungan pemda kepada pusat akan menurun. Dana yang bersumber dari PAD jauh diutamakan dibandingkan keuangan yang bersumber selain PAD. Hal ini dikarenakan PAD bisa dialokasikan tepat pada kebutuhan dan inisiatif pemda untuk kelancaran pelaksanaan kepentingan daerahnya. Sumber utama PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur keuangan dalam rumah tangganya adalah salah satu parameter penting untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan mengindikasikan baiknya kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang juga sebagai pemasukan daerah yang berkontribusi pada struktur APBD. Saat ini, pemda hanya mampu mengumpulkan PAD sebesar 0,15 dari nilai APBD. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan pemda masih harus mendapatkan transfer dana dari pusat dengan mekanisme dana perimbangan

meliputi DBH,DAU, dan DAK yang satusama lain saling mengisi dan melengkapi (Usman *et al.*, 2008).

UU No. 033 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19, menerangkan Dana Perimbangan ialah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah guna memenuhi kepentingan daerah didalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang mempunyai peran untuk menyeimbangkan fiskal antara pempus dan pemda dengan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan, dan mengupayakan peningkatan kemampuan daerahnya didalam mencari potensi ekonomidaerah. Semakin banyak kucuran dana perimbangan yang diterima yang berasal dari pempus akan meunjukkan bahwa pemda sangat bergantung pada pempus dalam menyukupi kebutuhan masyarakatnya (Julitawati, 2012). Kebijakan pengalokasian semua dana tersebut diberikan kepada Pemda. Sesuai yang dipaparkan dalam penelitian Saragih (2003), dana bagi hasil berfungsi sebagai untuk menyeimbangkan fiskal antara pempus dan pemda dari pendapatan pajak yang dibagihasilkan. DAU berfungsi untuk pemeratakan fiskal antar pemda (*fiscalequalization*) di Indonesia. Untuk DAK merupakan dana yang dikucurkan sesuai kebijakan yang khusus/penting. Dana yang berasal dari pempus ini diharapkan pemda dapat menggunakannya secara efektif serta efisien oleh pemda dalam mengembangkan pelayanan untuk warganya. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sudah mencerminkan efektif dan efisien.

Penelitian Julitawati (2012) hasilnya menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemda kabupaten atau kota Provinsi Aceh. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wenny, 2012) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemda kabupaten atau kota di Provinsi Sumsel. Rukmana (2013) telah meneliti kaitan kinerja keuangan pemda kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau memakai variabel pajak daerah, retribusi daerah serta dana perimbangan. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa secara individu dana perimbangan dan pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda.

Penelitian berkaitan dengan kinerja keuangan pemda juga dilaksanakan oleh Patriati (2010). Hasil pengujian mengindikasikan bahwa jumlah *expenditure* dan *revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *real estate*, *grant* dan *taxes* tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemda. Begitu pula dengan jumlah *population* dan *tourist* tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Minarsih (2015) dalam penelitiannya mengindikasikan kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, *leverage* dan *intergovernment revenue* tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemda yang diprosikan ke dalam rasio efisiensi. Sedangkan, jika menggunakan rasio efektivitas maka *leverage* dan *intergovernment revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Abdullah dan Febriansyah (2015) mengatakan bahwa PAD mempengaruhi kinerja keuangan pemda Kabupaten dan

Kota se-Sumatra Bagian Selatan. Sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan.

Berdasarkan yang telah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Expenditure, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah”**.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) dengan beberapa perbedaan. *Pertama*, peneliti menambahkan variabel *expenditure* dan *leverage*. *Expenditure* adalah belanja operasional atau belanja rutin dalam suatu periode tertentu oleh pemerintah daerah dan ditujukan untuk menciptakan pelayanan publik sebaik-baiknya dalam daerahnya. Jika pelayanan publik terealisasi dengan baik, maka akan menunjukkan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah sudah dilaksanakan dengan baik. *Value for money* yang baik tercipta dari manajemen pembelanjaan yang baik, sehingga penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan baik pula (Patriati, 2010), sedangkan proporsi besarnya utang yang bersumber dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri disebut dengan *leverage*. Jika nilai *leverage* menunjukkan nilai yang tinggi maka kinerja keuangan pemda buruk (Minarsih, 2015).

Kedua, periode dalam penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) tahun 2011-2013 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2012-2014. *Ketiga*, sampel sebelumnya adalah seluruh Kota atau Kabupaten se-Sumatera Selatan, sedangkan objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Kota atau Kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan, hasil evaluasi pelaporan kinerja (LAKIP) Pemda oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang membantu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari hasil evaluasi LAKIP Pemda tahun 2012, terdapat 70% dari 20 Pemda yang dievaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memperoleh peringkat “Kurang (D)”, 15% memperoleh peringkat “Agak Kurang (C)” dan 15% memperoleh peringkat “Cukup Baik (CC)”. Pernyataan tersebut bisa menggambarkan masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga dapat disimpulkan masih buruknya penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat ditentukan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai ada/tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, *expenditure*, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang dirumuskan:

1. Apakah pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemda di Jateng?
2. Apakah Dana Perimbangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemda di Jateng?
3. Apakah *expenditure* dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemda di Jateng?
4. Apakah *leverage* dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemda di Jateng?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Agar mendapatkan bukti berpengaruh atau tidaknya pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemda di Jateng.
2. Agar mendapatkan bukti berpengaruh atau tidaknya dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemda di Jateng.
3. Agar mendapatkan bukti berpengaruh atau tidaknya *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemda di Jateng.
4. Agar mendapatkan bukti berpengaruh atau tidaknya *leverage* terhadap kinerja keuangan pemda di Jateng.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memperoleh dampak positif untuk banyak pihak. Berikut beberapa manfaat yang diinginkan peneliti:

1. Bagi Akademisi

Berkontribusi dalam pengembangan ilmu terutama yang berkaitan dengan beberapa faktor yang memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemda. Bisa digunakan sebagai bahan bacaan berkaitan dengan keuangan pemda. Selain itu dapat digunakan referensi bagi peneliti setelahnya.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemda dapat mengevaluasi dalam menerapkan keputusan dan memberikan acuan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemda.